

Diplomasi Indonesia dalam Konflik Palestina-Israel Tahun 2023-2024

Yuniarti^{1*}, Tendy², Rendy Wirawan³, Rafli Farenza⁴, Mardia⁵

^{1,2,3,4,5} Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Mulawarman, Indonesia (corresponding author: yuniarti@fisip.unmul.ac.id)

ABSTRACT

The Hamas attack on October 7, 2023, which signified the Palestinian struggle for liberation from Israeli occupation since 1948, was instead utilized by Israel as a pretext to justify its actions of genocide and other crimes against humanity towards Palestinians. With the support of Western nations, Israel proceeded with its genocidal acts and displaced the Palestinian population from the Gaza Strip to Rafah. These actions by Israel, which profoundly violate international laws and norms, have inevitably provoked negative reactions from countries supporting Palestinian independence from Israeli occupation. One such strong support comes from Indonesia, a nation that does not recognize Israel as a sovereign state and consistently advocates for Palestinian independence through its diplomacy. This study aims to describe Indonesia's diplomatic efforts in the Palestine-Israel conflict during 2023-2024 and the challenges encountered in these diplomatic endeavors. This research employs a qualitative method with a case study design. The data collection technique used is a literature review or library research. Indonesia's diplomatic efforts are analyzed using the concepts of diplomacy and world order. The findings indicate that Indonesia conducts its diplomatic efforts both bilaterally and multilaterally. Bilaterally, Indonesia integrates the Israel-Palestine peace agenda into its state visits to allied countries. Multilaterally, Indonesia voices the same agenda within international forums and institutions such as the UN, OIC, ASEAN, UNCTAD, and the International Court of Justice (ICJ). However, these efforts do not run smoothly as they encounter significant obstacles, primarily driven by an unjust global order and the double standards applied by superpowers such as the United States, which consistently supports Israel's actions.

Keywords: *Diplomacy; Indonesia; Israel-Palestine Conflict*

ABSTRAK

Serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023 yang menjadi tanda perjuangan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel sejak tahun 1948 justru dijadikan dasar Israel untuk membenarkan klaimnya untuk melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya terhadap Palestina. Dengan dukungan negara-negara Barat, Israel sukses melakukan genosida dan mengusir Bangsa Palestina dari Jalur Gaza menuju Rafah. Tindakan Israel yang melanggar hukum dan norma internasional ini tentu menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel. Salah satu dukungan ini datang dari Indonesia, salah satu negara yang tidak mengakui Israel sebagai

negara berdaulat dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui diplomasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya diplomasi Indonesia dalam konflik Palestina – Israel tahun 2023-2024 dan tantangan yang dihadapi dalam diplomasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka atau library research. Upaya diplomasi Indonesia ini akan dianalisis dengan konsep diplomasi dan tata dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melakukan upaya diplomasi secara bilateral dan multilateral. Secara bilateral, Indonesia membawa agenda perdamaian Israel – Palestina dalam lawatan-lawatan bilateralnya ke negara-negara sahabat. Secara multilateral, Indonesia menyuarakan hal yang sama dalam forum-forum Internasional di lembaga-lembaga seperti PBB, OKI, ASEAN, UNCTAD, dan International Court of Justice (ICJ). Namun upaya ini tidak berjalan mulus karena terdapat tantangan yang harus dihadapi struktur global yang tidak adil dan standar ganda yang dilakukan negara adidaya seperti Amerika Serikat yang memberikan dukungan terhadap setiap tindakan Israel.

Kata Kunci: Diplomasi; Indonesia; Konflik Israel-Palestina.

PENDAHULUAN

Konflik Palestina – Israel dimulai sejak didirikannya negara Israel di tanah Palestina pada 14 Mei 1948 atas dasar Deklarasi Balfour 1917. Deklarasi ini memberikan dukungan terhadap pembangunan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Berdirinya Israel ini disertai dengan Peristiwa Nakba (bencana), yaitu pengusiran dan pembunuhan Bangsa Palestina. Penjajahan Israel atas Palestina tentu menimbulkan gerakan pembebasan seperti Hizbullah, Hamas dan *Palestine Liberation Organization* (PLO). Bahkan sejak berdirinya negara zionis Israel ini, konflik terus berlangsung sejak tahun 1948 hingga 2024, antara Palestina dan negara-negara Arab pendukungnya melawan Israel. Meskipun pada kenyataannya negara Arab pendukung Palestina semakin berkurang, perjuangan bangsa ini untuk membebaskan diri terus berjalan yang terwakili oleh perlawanan kelompok seperti Hamas yang berdiri tahun 1987 di Gaza dengan Brigade Al Qassam-nya, Jihad Islam Palestina yang dibentuk tahun 1981 di Gaza dengan Brigade Al Quds-nya, dan Fatah yang didirikan tahun 1957 di Kuwait dengan Brigade Martir al Aqsa-nya yang beroperasi wilayah Nablus, bagian utara Tepi Barat dan Jenin.

Penjajahan memakan nyawa bangsa Palestina gugur sejak peristiwa Nakhba 1948,

Intifada I tanggal 9 Desember 1987, Intifada II tanggal 28 Desember 2000, serangan militer Israel tahun 2005, 2008, 2014 hingga 2023 (YDSF, 2023) seakan membuktikan harga mahal yang harus dibayar oleh bangsa ini untuk kemerdekaannya. Bahkan dalam konflik tahun 2023 – 2024, genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Bangsa Palestina tidak hanya menjadi ujian bagi Bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya tetapi juga menjadi ujian bagi negara-negara lain yang hidup dalam satu tatanan di bawah PBB untuk bersikap adil bagi kemanusiaan.

Konflik tahun 2023-2024 diawali oleh serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023 di wilayah Israel Selatan. Serangan ini dilatarbelakangi rencana Israel untuk menguasai Masjidil Aqsa secara total dan eksplorasi gas di lepas Pantai Jalur Gaza. Serangan ini akhirnya dijadikan pembenaran bagi Israel untuk melakukan genosida terhadap bangsa Palestina dalam rangka menjalankan rencananya. Akibatnya serangan militer yang dilancarkan Israel ini menghancurkan kehidupan di segala aspek Bangsa Palestina. Bahkan ketika kecaman-kecaman terhadap Israel diserukan di berbagai wilayah di dunia, aksi Israel tidak berhenti.

Kejahatan perang yang dilakukan Israel ini mendorong banyak negara untuk mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia,

salah satu negara yang tidak mengakui kedaulatan Israel di tanah Palestina. Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina sejak tahun 1988, dan Palestina sudah memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia sejak 4 September 1944 (kemenag.go.id, 2017). Bagi Indonesia, penjajahan Israel telah melanggar *self-determination right* Palestina dan melanggar prinsip dan nilai kemanusiaan dengan melakukan genosida (pembersihan etnis). Indonesia yang memiliki hubungan baik dengan Palestina berupa memberi dukungan maksimal untuk mencari jalan terbaik bagi penyelesaian konflik ini dan Palestina bisa diakui sebagai bangsa yang merdeka dan negara yang berdaulat.

Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel–Palestina bukanlah hal yang baru. Diplomasi dalam memperjuangkan hak-hak Palestina sebagai bangsa dan negara yang berdaulat pada tahun 2000an dimulai pada saat Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008, mendorong pertemuan khusus untuk Palestina di Dewan HAM pada 9-12 Januari 2009 saat menjadi anggota Dewan HAM PBB, menggagas sidang khusus di Majelis Umum PBB pada 15-16 Januari 2009 tentang isu Palestina, mendukung Palestina sebagai pengamat di PBB tahun 2012, mendorong tercapainya Declaration on Palestine dalam Konferensi Asia Afrika tahun 2015, menjadi tuan rumah *International Conference on the Question of Jerusalem* yang diselenggarakan bersama dengan OKI dan *United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People* pada 14-15 Desember 2015, dan aktif mendukung peran *United Nation Relief and Works Agency for Paletine Refugees* (UNRWA) (Mudore, 2019).

Diplomasi Indonesia dalam pada tahun 2023-2024 semakin mempertegas posisi Indonesia dalam Konflik Israel–Palestina. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan diplomasi Indonesia dalam konflik Israel–Palestina tahun 2023–2024 dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam berdiplomasi. Sebab, peneliti menduga terdapat intensifikasi Upaya diplomatic yang dilakukan Indonesia pada rentang tahun 2023-2024 berbanding

dengan tahun sebelumnya pada masa pemerintahan Joko Widodo, dan setelahnya pada masa Prabowo Subianto yang cenderung menurunkan agregat Upaya diplomasi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina.

TINJAUAN PUSTAKA

Diplomasi merupakan kegiatan yang telah lama dipraktekkan dalam hubungan antar kekuasaan atau negara. Diplomasi sudah ada sejak peradaban ada. Hal ini bisa dilihat dan dipahami dengan melihat komunikasi yang terstruktur antara dua belah pihak atau lebih yang dijalankan sejak 2500 tahun yang lalu melalui kontak reguler para utusan kekuasaan yang bertetangga. Yang perlu digarisbawahi adalah komunikasi ini terjalin pada masa yang damai. Diplomasi dapat mendorong pertukaran yang mendorong pertukaran yang meningkatkan perdagangan, budaya, kekayaan dan pengetahuan (McGlinchey, 2017). Dalam perkembangannya, praktek diplomasi ini berkembang dalam hal karakter dan konten (Özer, 2018; McGlinchey, 2017). Oleh karena itu, definisi, aktor dan lingkup diplomasi pun berkembang dari waktu ke waktu, dan tidak lagi terikat ketat dengan kerangka hubungan diplomasi menurut Konvensi Vienna 1969 tentang Hubungan Diplomatik.

Beberapa definisi diplomasi berikut akan menjelaskan aktor dan lingkup diplomasi:

1. Diplomasi merupakan merupakan lembaga utama dalam hubungan internasional (Wight, 2002).
2. Diplomasi adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; metod dimana hubungan-hubungan ini diatur dan dikelola oleh duta besar dan utusan; bisnis atau senidiplomasi (Nicolson, 1969).
3. (Diplomasi) adalah pelaksanaan hubungan antara negara dengan entitas lain yang memiliki kedudukan dalam politik dunia melaui agen-agen resminya dan dengan cara-cara damai, hubungan demikian yang dilaksanakan oleh diplomat profesional dijalankan dengan cara yang bijaksana dan halus (Bull, 1977).
4. “Diplomasi berkaitan dengan pengelolaan hubungan antara negara dan aktor lainnya. Dari perspektif negara, diplomasi berkaitan dengan pemberian nasihat, pembentukan

dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, diplomasi merupakan sarana yang digunakan oleh negara melalui perwakilan formal dan perwakilan lainnya, serta aktor lainnya, untuk mengartikulasikan, mengoordinasikan, dan mengamankan kepentingan tertentu atau kepentingan yang lebih luas, dengan menggunakan korespondensi, pembicaraan pribadi, pertukaran pandangan, lobi, kunjungan, ancaman, dan kegiatan terkait lainnya (Barston, 2013).

kebijakan luar negeri. Hal ini tidak salah tetapi tidak sepenuhnya

5. Diplomasi pada dasarnya adalah kegiatan politik dan, dengan sumber daya yang memadai dan terampil, merupakan unsur utama kekuatan. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan negara mengamankan tujuan kebijakan luar negeri mereka tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Oleh karena itu, diplomasi terdiri dari komunikasi antara para pejabat yang dirancang untuk mempromosikan kebijakan luar negeri baik melalui kesepakatan formal maupun penyesuaian secara diam-diam (Berridge, 2010).
6. Diplomasi adalah 'pelaksanaan hubungan secara damai di antara entitas politik, pemimpin-pemimpin dan agen-agen yang terakreditasi' (Hamilton & Langhorne, 2010).
7. Diplomasi secara konvensional dipahami sebagai proses dan institusi yang digunakan untuk merepresentasikan kepentingan dan identitas negara-negara berdaulat satu sama lain (Devetak et.al., 2012).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan aktor, alat dan lingkup diplomasi. Jika dilihat dari pemahaman yang mendalam, maka lingkup diplomasi menggambarkan hubungan politik antar negara termasuk kegiatan para diplomat dan menteri luar negeri. Inilah yang menyebabkan sejarah hubungan internasional antar negara didefinisikan sebagai sejarah diplomasi.

Diplomasi juga dianggap sebagai pelaksanaan mekanis dari hubungan luar negeri melalui perwakilan diplomatik. Oleh karena itu muncul pemahaman bahwa diplomasi tidak terlepas dari kebijakan luar negeri. Diplomasi dianggap sebagai alat

benar. Hal ini disebabkan dalam hubungan modern tidak mungkin mendefinisikan diplomasi hanya dalam batasan kebijakan luar negeri atau hubungan politik antar negara yang dijalankan oleh para negarawan atau diplomat karena lingkup diplomasi yang meluas dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul istilah diplomasi lama (atau tradisional) dengan diplomasi baru.

Diplomasi baru tidak hanya meliputi hubungan politik tetapi juga ekonomi dan sosial dan aspek-aspek lain dalam hubungan internasional sesuai dengan terjadinya internasionalisasi beragam isu yang menjadi bagian dari kebijakan dalam negeri. Hak asasi manusia, kesehatan, terorisme dan lingkungan tidak lagi dilihat dari ~~perspektif~~ lokal tetapi sudah menjadi perhatian masyarakat internasional. Isu-isu baru yang muncul dalam agenda diplomasi memperluas konten diplomasi sebagaimana halnya aktor yang beragam.

Keberagaman aktor dalam diplomasi tergantung pada lingkupnya. Dalam diplomasi tradisional, aktor dalam diplomasi adalah pegawai kementerian luar negeri (Kemlu) dan anggota korps diplomatik dari duta besar hingga stafnya. Dalam diplomasi modern, aktor-aktor baru juga terlibat dalam mempengaruhi hubungan internasional. Beberapa aktor non-negara seperti organisasi non-negara, perusahaan swasta, korporasi, yayasan, kelompok profesional, kelompok sosial bahkan individu menjadi aktor dalam diplomasi. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi transportasi dan komunikasi memudahkan aktor-aktor ini terlibat dalam diplomasi.

Fakta bahwa negara menyerahkan kekuasaan kepada aktor-aktor tertentu pada beberapa level kegiatan diplomasi menyebabkan munculnya beragam lembaga diplomatik. Dalam diplomasi tradisional, hubungan diplomatik berjalan baik secara bilateral maupun multilateral. Diplomasi bilateral mendefinisikan hubungan dua negara, sedangkan diplomasi multilateral merupakan

hubungan lebih dari dua negara. Diplomasi tradisional yang menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor dalam kegiatannya dikenal juga sebagai diplomasi *government to government* (G to G diplomacy) (Pouliot & Cornut, 2015).

Diplomasi multilateral merupakan hasil dari diplomasi modern. Dorongan kemunculan diplomasi ini adalah berdirinya Liga Bangsa-Bangsa pasca Perang Dunia I dan kemunculan negara-negara baru sejak 1945. Diplomasi multilateral memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya adalah menjadi landasan kerjasama. Kerjasama ini bisa diarahkan untuk tujuan penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan yang diinginkan para pihak (Özer, 2018).

Di sisi lain, kelemahannya adalah jika ada salah satu atau beberapa pihak tidak sepakat maka diplomasi bisa mengalami kebuntuan dan solusi tidak tercapai. Hal ini terjadi ketika ada negara besar yang memiliki kepentingan yang tidak sama dengan yang lain. Negara dengan karakter seperti ini memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan internasional karena memiliki kemampuan yang bersumber dari wilayah, posisi strategis dan luas geografis, populasi, sumber daya, kekuatan militer, stabilitas politik dan kekuatan ekonomi, termasuk elemen soft power. Elemen ini dideskripsikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan yang diinginkan melalui atraksi dibandingkan paksaan dan pembayaran (Özer, 2018). Hal ini terjadi dalam proses diplomasi Kongres Vienna, dimana kongres ini didominasi oleh diplomasi kekuatan besar, yaitu *the Holy* dan *the Quadruple Alliance*, dan tidak membiarkan suara dari negara lain atau negara berkekuatan kecil untuk menyuarakan kepentingan atau pendapatnya (Devetak et.al, 2012).

Meskipun kongres-kongres tersebut berakhir tak lama setelah Kongres Wina, sisa periode hingga Perang Dunia Pertama dibentuk oleh dominasi Kekuatan Besar dan aliansi, yang membawa periode perdamaian relatif yang

dikenal sebagai *Concert of Europe*. Sejak saat itu, penyelesaian pasca perang dan proses perdamaian telah menjadi tujuan utama diplomasi kekuatan besar. Dengan gagalnya upaya-upaya ini dengan Perang Dunia Kedua, kekuatan besar diplomasi kekuatan besar dilembagakan dengan anggota tetap permanen di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bentuk utama diplomasi kekuatan besar yang diambil dalam Periode Perang Dingin adalah diplomasi negara adidaya dalam sistem internasional bipolar. Berakhirnya Perang Dingin membawa jenis kekuatan besar yang baru besar, yang dapat digambarkan sebagai diplomasi hegemonik. Diwakili oleh Amerika Serikat di era pasca-Perang Dingin, diplomasi hegemonik tidak hanya mencakup diplomasi bilateral dan multilateral tetapi juga diplomasi unilateral dalam hubungan antar negara. Namun kekuatan besar dalam sistem internasional tetap menjalankan ~~menjalankan~~ cara lama diplomasi kekuatan besar melalui melalui pertemuan-pertemuan puncak yang diwakili oleh kepala negara.

Diplomasi kekuatan besar ini tentu menjadi tantangan besar dalam diplomasi multilateral yang bisa terjadi di setiap forum-forum dalam lembaga – lembaga internasional dimana diplomasi kekuatan besar akan menentukan hasil akhir dalam sebuah negosiasi. Suara-suara kekuatan kecil atau menengah yang dapat membentuk suara mayoritas pun bisa saja mengalami kebuntuan akibat blokade dari aktor super power yang mendominasi..

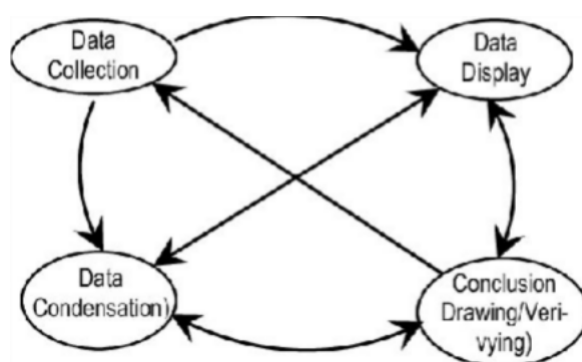
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus (Neuman, 2014) yang bersifat deskriptif dilihat dari tujuan penelitiannya (Neuman 2014). Penelitian ini mendeskripsikan kasus diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel –Palestina dalam periode 2023 – 2024. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang digali dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi ini fokus pada peninjauan konteks, sejarah, dan teori (Neuman, 2014) yang berhubungan dengan informasi dan data

tentang diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel – Palestina tahun 2023 - 2024.

Analisis data dilakukan data digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles, et al (2014), dan hal tersebut dapat ditampilkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles et.al, 2014

Langkah-langkahnya meliputi:

- Pengumpulan Data (Data Collection):** Proses pencarian data di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi.
- Kondensasi Data (Data Condensation/Reduksi):** Proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna.
- Penyajian Data (Data Display):** Pengorganisasian informasi dalam bentuk narasi, tabel, bagan, atau matrik agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.
- Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification):** Penarikan makna data yang dilakukan dari awal penelitian dan terus diverifikasi hingga mendapatkan kesimpulan yang valid (Miles et.al, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN DIPLOMASI INDONESIA

Ketidakadilan yang dihadapi bangsa Arab-Palestina dengan adanya pendudukan Israel selama kurang lebih 70 tahun ini tentunya menarik simpati Indonesia sebagai negara

yang juga memiliki sejarah kolonialisme. Tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan Israel bertentangan keras dengan prinsip negara Indonesia yang tercantum pada Sila ke-2 Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”, sedangkan apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran luar biasa terhadap prinsip tersebut (Nugraha & Maura, 2023).

Konteks diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina sejatinya juga didasari pada kepentingan Indonesia untuk mewujudkan salah satu amanat landasan konstitusional Republik Indonesia, lebih tepatnya tercantum pada alinea pertama dan keempat pembukaan undang-undang dasar 1945. Pada kedua alinea tersebut, dapat diketahui posisi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan diatas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selain juga dapat diketahui bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah menghapuskan penjajahan dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itulah Indonesia sangat mengedepankan diplomasi kemanusiaan pada ranah Internasional (Kemlu, 2020b).

Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1962 Indonesia telah mengambil peran aktif dan sangat konsisten dalam mendukung penuh hak-hak rakyat Palestina agar segera memperoleh kemerdekaannya. Indonesia secara aktif berperan sebagai *co-sponsor*, inisiator, motivator dan fasilitator Palestina dalam forum-forum internasional (Mudore, 2019). Selain itu, Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan pendanaan untuk pembangunan fasilitas umum di Palestina (Kemlu, 2018).

Hingga sekarang pun pemerintah Indonesia masih terus aktif dalam mengikuti perkembangan konflik Palestina-Israel. Bahkan di tengah maraknya normalisasi hubungan antara negara di Liga Arab dengan

Israel, Indonesia tetap konsisten untuk tidak mengakui keabsahan Israel sebagai bentuk dukungannya kepada Palestina. Hal ini sering kali dikaitkan dengan faktor pendukung berupa adanya kesamaan identitas Palestina dan Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya berkeyakinan Islam. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia tentunya merasa berhak dan berkewajiban dalam memberikan dukungan kepada masyarakat Palestina. Dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina juga didukung dengan adanya faktor hutang moral Indonesia kepada Palestina sebagai negara pertama mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto*. Berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri tahun 2024, konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina ini juga disebabkan selalu tertanamnya Palestina dalam hati rakyat Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, negara memiliki kewajiban untuk mencerminkan isi hati rakyatnya dengan terus mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia juga semakin aktif membawa isu kemerdekaan Palestina baik dalam pertemuan bilateral maupun multilateral pada tiap forum internasional yang dihadiri Indonesia seperti KTT-Asean, OKI, PBB dan lain-lain. Bahkan, kemerdekaan Palestina merupakan isu yang paling diperjuangkan Indonesia selama menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB tahun 2019.

Diplomasi Indonesia yang dilakukan di sepanjang tahun 2023 – 2024 adalah diplomasi tradisional dimana aktor-aktor yang berkegiatan adalah pemerintah, dan yang dituju adalah pemerintah negara lain (*government to government*), baik bilateral maupun multilateral. Bahkan pemerintah Indonesia juga menjalankan diplomasi publik dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan.

Diplomasi Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berhenti dan secara konsisten menjunjung tinggi prinsip dan nilai kemanusiaan, serta terus mendukung

perjuangan kemerdekaan Palestina. Hingga saat ini Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan dan menjalankan diplomasi dalam sejumlah forum dan secara bilateral dengan negara lain untuk mendesak penghentian konflik antara Israel dan Palestina yang kembali memanas sejak 7 Oktober 2023.

Diplomasi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel tahun 2023-2024 ini memprioritaskan beberapa hal yaitu: (1) Mendorong agar terciptanya gencatan senjata dan berkelanjutan atau *immediate and sustainable ceasefire*; (2) Indonesia terus mendukung kinerja UNRWA dan mendorong negara lain untuk bergabung dalam memberikan dukungan; (3) Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan telah mengirimkan lebih dari 4.500 ton bantuan kemanusiaan; (4) Indonesia mendorong agar semua keputusan Mahkamah Internasional dapat dipatuhi oleh Israel dan mendorong agar DK PBB dapat membuat sebuah keputusan memaksa agar Israel patuh dan menjalankan keputusan Mahkamah Internasional; (5) Indonesia mendorong lebih banyak negara untuk mengakui negara Palestina dengan melakukan kunjungan di Eropa sepanjang 2024; dan (6) Indonesia terus berupaya agar terwujudnya resolusi two-state solution bagi konflik Israel-Palestina dan mendesak PBB untuk segera menyelesaikan proses keanggotaan Palestina di PBB (Kemlu, 2024l).

1. Diplomasi Bilateral

Beberapa tindakan nyata konsistensi Indonesia dalam mendukung hak-hak Palestina pada konflik di tahun 2023-2024 dibuktikan dengan dilakukannya diplomasi *government to government* secara rutin. Pada November 2023, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joe Biden untuk menyinggung konflik Palestina-Israel. Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo menyampaikan ajakan langsung kepada Presiden Joe Biden untuk menghentikan konflik dan kekejaman yang sedang terjadi di Gaza

pasca serangan 7 Oktober 2023 (Kemlu, 2023n).

Pada periode 2023 hingga pertengahan tahun 2024 Menteri Retno Marsudi juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral dan kunjungan kepada beberapa negara seperti Iran, Kuwait, Libanon, Yordania, Malaysia, Rwanda, Turki, Jepang dan Brunei untuk membahas isu Palestina dan seruan untuk mendesak penghentian konflik. Sejak awal tahun 2024 Menteri Retno Marsudi juga melakukan pertemuan bilateral secara terkhusus pada negara - negara Eropa, yaitu Austria, Slovenia, Norwegia, Spanyol, Jerman dan Irlandia untuk mempromosikan dukungan terhadap implementasi *two - state solution* sebagai resolusi konflik Israel - Palestina dan mengajak negara - negara Eropa tersebut agar mempertimbangkan untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Penguatan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Eropa ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat dukungan internasional pada kemerdekaan Palestina, khususnya dengan Slovenia yang saat ini sedang menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB yang juga aktif mendukung terwujudnya kemerdekaan Palestina pada forum Internasional (Kemlu RI, 2024l).

2. Diplomasi Multilateral

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Indonesia secara konsisten menunjukkan komitmen dukungan atas perdamaian dan hak kemerdekaan Palestina di forum internasional. Dalam Dewan Keamanan PBB Indonesia terus mendorong tiga aspek dalam mendukung Palestina, yaitu; (1) gencatan senjata secara permanen akan menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza dan terus mendukung adanya upaya humanitarian dan rekonstruksi untuk membuka jalan bagi

pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza; (2) menuntut pemenuhan status Palestina sebagai anggota penuh PBB, menurut Indonesia hal ini penting agar dapat mewujudkan solusi antar negara dan mencegah terjadinya kekerasan atau kejahatan perang lebih lanjut di Palestina; (3) Indonesia menyampaikan pernyataannya untuk membuka fatwa hukum atau *advisory opinion* kepada Mahkamah Internasional melalui sidang umum PBB dengan menyatakan bahwa Indonesia mendukung Palestina dan hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

Dalam *High-Level Open Debate* DK PBB pada 24 Oktober 2023 di New York, Indonesia mendesak dewan keamanan PBB untuk segera bertindak agar menghentikan konflik di Gaza dan segera mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Menlu RI mengatakan DK PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina dan menegaskan Indonesia tidak membuang – buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera dan fokus pada isu kekerasan dan bencana kemanusiaan. Dalam sidang PBB ini, Indonesia mendesak segera dilakukannya seruan bersama untuk gencatan senjata, memprioritaskan akses kemanusiaan dengan mendesak DK PBB agar memberikan akses bantuan yang lancar dan aman serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Indonesia juga mendesak DK PBB bahwa kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan karena DK

memiliki kekuatan besar untuk mengatasi situasi di Gaza dan agar terwujudnya solusi dua negara (Kemlu, 2024m).

Indonesia menggalang dukungan 11 negara dari berbagai kawasan yaitu Banglades, Afrika Selatan, Maladewa, Timor Leste, Turki, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Namibia dan Tailan, menyampaikan *joint letter* kepada presiden Majelis Umum PBB mendukung permintaan kelompok Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar Majelis Umum PBB segera menggelar sidang *Emergency Special Session*. Oleh karena itu, pada 12 Desember 2023, pertemuan *Emergency Special Session* ke-10 Majelis Umum PBB di New York dengan resolusi yang berjudul “*Protection of Civilians and Upholding Legal and Humanitarian Obligations*”, sebanyak 153 negara mendukung Resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut agar segera dilakukannya gencatan senjata kemanusiaan.

Bersama dengan tujuh Menteri Luar Negeri OKI, Indonesia juga melakukan *Shuttle Diplomacy* ke negara - negara anggota tetap DK PBB seperti Tiongkok, Rusia, Perancis dan Inggris untuk menggalang dukungan agar segera dilakukannya gencatan senjata di Gaza. Resolusi Majelis Umum PBB merupakan pernyataan politis bagi negara - negara anggota PBB mengenai suatu isu internasional, dan sebanyak 153 negara mendukung resolusi terhadap gencatan senjata di Gaza menunjukkan semakin tingginya tekanan politis dari berbagai negara untuk menghentikan aksi militer Israel dan serangan terhadap kemanusiaan, serta dukungan politis ini juga mendorong

Amerika Serikat untuk menghentikan dukungannya terhadap Israel (Kemlu, 2023m).

Dalam peringatan ke - 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Markas Dewan HAM PBB di Jenewa pada 11 Desember 2023, Indonesia menyampaikan empat komitmen untuk pemajuan HAM, diantaranya adalah: (1) Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungannya kepada Palestina sebagai calon terpilih anggota dewan HAM PBB, termasuk dengan peningkatan kontribusinya ke UNRWA; (2) Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan proses ratifikasi konvensi internasional guna perlindungan semua orang dari penghilangan paksa dengan catatan jika konvensi tersebut telah diratifikasi, maka Indonesia telah meratifikasi semua instrumen inti dari HAM Internasional; (3) Indonesia juga berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak penyandang disabilitas dengan memperkuat peran komisi nasional disabilitas; dan (4) Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Selain itu, Menlu RI juga berbicara mengenai situasi Hak Asasi Manusia di Palestina pada *High Level Event* pada 12 Desember 2023 (Kemlu 2023b).

b. *UN Trade and Development (UNCTAD)*

Kepemimpinan Indonesia di *UN Trade and Development* atau UNCTAD memegang peranan penting dalam politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam memajukan kepentingan negara berkembang, juga untuk meningkatkan pentingnya UNCTAD

di tingkat internasional dengan memprioritaskan kepentingan Indonesia dan negara lainnya. Salah satu agenda utama penting dalam pembahasan laporan UNCTAD adalah terkait bantuan untuk Palestina akibat konflik dan krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Konferensi pers yang berlangsung di Jenewa dalam Pertemuan ke - 74 *Executive Session Trade Development Board* (TDB), *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pada 20 Oktober 2023, Duta Besar Febrian A. Ruddyard yang merupakan wakil tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya memimpin pembahasan agenda Palestina dan perlu diketahui bahwa UNCTAD sebagai bagian dari PBB telah membantu Palestina selama 3 dekade terakhir.

Pada kesempatan ini Indonesia ~~mengutukera-keras serangan~~ mengutukera-keras serangan militer Israel ke Gaza dan serangan ke Rumah sakit Indonesia yang mengakibatkan banyak korban jiwa di Gaza. Sebagaimana pemerintah berdiri, Indonesia mendorong gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan ke Palestina. Indonesia sendiri tetap berkomitmen membantu Palestina dengan mengirimkan bantuan masyarakat Indonesia sebagai respons terhadap situasi Gaza. Pertemuan di Jenewa tersebut menandai pertemuan pertama UNCTAD di bawah kepemimpinan Duta Besar Febrian sebagai presiden *Trade and Development Board* (TDB) UNCTAD periode 2023 - 2024 dan dalam perannya, Duta Besar Febrian akan memimpin berbagai persidangan penting UNCTAD hingga melaporkan kinerja TDB UNCTAD pada sidang umum PBB di New York. Selain itu, kepemimpinan Indonesia pada UNCTAD memegang peranan

penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia terutama dalam memajukan kepentingan negara berkembang (Kemlu, 2021a, 2023c, 2024i)

c. KTT *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) 2023

Pada November tahun 2023, Indonesia menghadiri Forum KTT APEC yang mengusung isu pembangunan global inklusif. Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo melakukan diplomasi multilateral dengan menyampaikan sikap tegas dan kritik Indonesia terhadap kejahatan Israel pada kawasan Gaza khususnya sejak Oktober 2023. Dimana tindakan Israel dianggap sudah jelas melanggar norma-norma hukum internasional, melanggar hak hidup dan pembangunan inklusif bagi masyarakat Gaza. Presiden Joko Widodo juga mendesak para Pemimpin APEC untuk segera bersikap dalam mendukung gencatan senjata di Palestina (Kemlu, 2023q).

d. Dialog Politik ke-7 Indonesia-Uni Eropa

Pada tahun 2023-2024 Indonesia menargetkan dukungan lebih dari negara kawasan Eropa dalam mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan di Palestina. Selain melakukan diplomasi bilateral secara khusus dengan beberapa negara Eropa, Indonesia juga melakukan pertemuan dan diplomasi dengan Uni Eropa. Dalam dialog politik antara Indonesia dan Uni Eropa pada September 2023, Indonesia dan Uni Eropa membahas kondisi memprihatinkan yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah. Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat bahwa desakan untuk penyelesaian konflik secara komprehensif dan adil antara Israel dan Palestina harus segera dilakukan dengan prinsip *two-state*

solution sebagai salah satu opsi (Kemlu, 2023p).

e. Mahkamah Internasional

Mahkamah internasional atau ICJ merupakan salah satu forum yang menjadi prioritas Indonesia dalam berdiplomasi guna mendukung kemerdekaan Palestina. Mengingat ICJ merupakan badan yang dapat mempengaruhi pandangan majelis umum PBB terkait implikasi hukum yang ditimbulkan dari pendudukan Israel terhadap Palestina.

Pada forum pertemuan ICJ tahun 2024, Indonesia mengupayakan terwujudnya gencatan senjata permanen di Palestina setelah puluhan tahun pendudukan Israel dengan memberikan nasehat hukum atau *Advisory Opinion* kepada Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, Indonesia berupaya untuk kembali meyakinkan ICJ bahwa Israel telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan sudah sepatutnya untuk segera diadili. Indonesia juga menegaskan berbagai pelanggaran Israel seperti aneksasi wilayah Palestina, pendirian permukiman di Tepi Barat, diskriminasi dan kekerasan Israel kepada masyarakat sipil Palestina, termasuk perubahan status Kota suci Yerusalem yang disinyalir sebagai upaya Israel dalam mengubah komposisi demografi, karakter kota tersebut dan tentunya bertentangan dengan hukum internasional yaitu Konvensi Jenewa IV.

Dalam forum ini Indonesia juga menekankan bahwa secara yurisdiksi ICJ memiliki wewenang untuk memberikan fatwa kepada DK PBB dalam menangani konflik Israel dan Palestina. Maka dari itu, Indonesia juga mendesak ICJ untuk segera melakukan penyidikan dan

penegakan hukum internasional bagi pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Pada forum ICJ, Indonesia juga mendukung penuh tuntutan beberapa negara termasuk tuntutan Afrika Selatan terhadap Israel atas kejahatan Genosida. Beberapa tuntutan tersebut, akhirnya membuahkan hasil pada 24 Mei 2024 dimana ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan militernya terhadap Gaza. (Kemlu, 2024n).

Walaupun beberapa hari kemudian Israel kembali melanggar perintah ICJ dengan melancarkan serangan militer ke Kota Rafah, namun perlu disadari bahwa diplomasi yang terjadi dilakukan Indonesia dan beberapa negara pendukung Palestina dalam forum ICJ cukup berhasil dalam mempengaruhi pandangan ICJ dan majelis umum PBB terhadap konflik Israel – Palestina.

f. *ASEAN Foreign Ministers Retreat* (AMM)

Berakhirnya kepemimpinan Indonesia pada ASEAN juga tidak melemahkan upaya Indonesia dalam mempromosikan perdamaian Palestina di negara-negara ASEAN. Pada pertemuan AMM Januari 2024, Indonesia dan negara ASEAN menyepakati untuk dilanjutkannya hasil-hasil keketuaan Indonesia pada tahun sebelumnya termasuk kesepakatan untuk melanjutkan *ASEAN Human Rights Dialogue* dan kesepakatan tentang sikap ASEAN terhadap isu Palestina. Dalam pertemuan ini ASEAN masih konsisten mendukung perdamaian bagi Palestina, menyerukan gencatan senjata permanen, mengutuk keras tindakan kejahatan perang Israel terhadap rakyat sipil, dukungan terhadap *two-state solution* dan sepakat untuk mendesak Israel

mematuhi keputusan ICJ terkait Gaza (Kemlu, 2024n)

- g. KTT Luar Biasa *Organization of Islamic Cooperations* (OIC)
Menguatkan solidaritas negara-negara Islam dalam forum OIC merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia dalam mempromosikan perdamaian Palestina. Pada periode 2023-2024 Indonesia telah melakukan berbagai pertemuan dengan negara-negara OIC terkhusus untuk menanggapi krisis di Gaza pasca serangan 7 Oktober 2023. Dalam beberapa pertemuan tersebut Indonesia mendorong OIC untuk bersatu pada garda terdepan untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Menggunakan berbagai upaya diplomasi damai untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Indonesia juga menyampaikan beberapa saran konkret kepada pemimpin OIC terkait konflik di Gaza. Pertama, OIC harus bersatu dan tetap konsisten dalam mendesak gencatan senjata Israel, mendorong percepatan dan perluasan bantuan kemanusiaan di Gaza salah satunya dengan mengaktifkan peran *Islamic Financial Safety Net*. Menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan pendudukan sekaligus mendesak *Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory* sebagai produk dari Dewan HAM PBB untuk segera melaksanakan mandatnya dan yang terakhir Indonesia juga mendesak OIC untuk mendukung diadakannya perundingan damai dalam mewujudkan *two-state solution* bagi Palestina (Kemlu, 2024g).

- h. *Asia Cooperation Dialogue* (ACD)
Pertemuan tingkat menteri *Asia Cooperation Dialogue* (ACD) *Ministerial Meeting* ke - 19 di Iran

pada 24 Juni 2024 dilakukan oleh Indonesia dan negara - negara anggota untuk membentuk komunitas Asia yang inklusif dengan tema “*Towards an Asia Community Through Enhanced ACD*” termasuk menyuarakan solidaritasnya terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Selain mengesahkan dokumen administratif ACD dan komitmen kerjasama antar negara anggota, dalam pertemuan ini negara anggota berkomitmen penuh untuk mendukung Palestina sebagai anggota penuh PBB dan sudah seharusnya ACD menunjukkan solidaritas yang tinggi terhadap situasi di Gaza. Pertemuan ini mendapat respon positif oleh negara anggota ACD (Kemlu, 2024a)

- i. KTT D-8
Melalui pertemuan KTT D-8 di Istanbul, Turki pada 8 Juni 2024, Indonesia bersama dengan anggota D-8 lainnya yaitu Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria melakukan pertemuan khusus untuk membahas mengenai perkembangan situasi di Gaza. Pertemuan ini didasari karena perlunya untuk memperkuat kinerja OKI terhadap Palestina di tengah isu krisis kemanusiaan ini. Dalam pertemuan ini, Indonesia menyampaikan bahwa sebelum tercapainya gencatan senjata, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan untuk terus membantu Palestina dan negara anggota D-8 harus terus menggunakan pengaruhnya agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina sehingga D-8 dapat melakukan upaya *driving force* agar Palestina menjadi anggota penuh PBB. Selain itu anggota D-8 juga terus menyuarakan betapa pentingnya kelancaran bantuan kemanusiaan atau *unhindered humanitarian assistance* dan mendukung kinerja UNRWA.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel menjadi tantangan nyata dalam setiap diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara yang menginginkan konflik ini berakhir termasuk Indonesia. Penolakan Amerika Serikat dan Israel akan resolusi Majelis Umum PBB, rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB dan keputusan Mahkamah Internasional praktis membuat kebuntuan dalam pencarian solusi damai di lembaga-lembaga tersebut (Nugraha, 2024; Ayu, 2024).

Beberapa keputusan PBB yang ditolak oleh Israel dan Amerika Serikat adalah:

1. Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 11 Desember 2024 yang berisi seruan tegas penghentian serangan militer di Gaza melalui gencatan senjata permanen. Resolusi ini didukung oleh 158 negara dan ditolak sembilan negara termasuk Amerika Serikat dan Israel (un.press.org, 2024a).
2. Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 18 September 2024 yang menyerukan agar Israel pergi dari Palestina dan mengakhiri pendudukannya paling lambat 12 bulan ke depan (setelah September 2024). Resolusi ini didukung oleh 124 negara, 14 menolak, dan 43 abstain (un.press.org, 2024b).
3. Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB 23 Januari 2024 yang berisi solusi dua negara.
4. Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 19 Juli 2024 yang menyatakan bahwa keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal (OHCHR, 2024).

Meskipun tekanan internasional untuk gencatan senjata di Gaza terus meningkat, pemerintah Benjamin Netanyahu masih bertahan dalam kampanye militernya untuk mencapai tujuannya memberantas Hamas, membebaskan para sandera, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel (Bargués & Bourekba, 2024). Tindakan-tindakan Israel ini tidak lepas dari dukungan Amerika Serikat baik dalam forum-forum internasional maupun

dukungan dana selama Konflik Gaza melawan Hamas.

Sejak perang antara Israel melawan Hamas di Gaza pada 7 Oktober 2023 hingga April 2024, Amerika Serikat telah mengesahkan peraturan yang menyediakan bantuan militer kepada Israel sebesar US\$ 12.5 miliar secara langsung, termasuk US\$ 3.8 miliar pada Maret 2024 dan US\$ 8.7 miliar pada April 2024. Bantuan-bantuan ini termasuk perlengkapan perang seperti amunisi tank dan artileri, bom, roket, dan senjata ringan, dan kelengkapan iron dome missile defense system (Masters & Merrow, 2025; Bilmes et.al, 2024).

Selain itu diplomasi Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB yang memveto rancangan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Jalur Gaza meskipun rancangan ini didukung oleh 14 suara dari empat negara anggota tetap dan sepuluh negara anggota tidak tetap. Veto Amerika Serikat ini praktis menggagalkan upaya menciptakan perdamaian di Gaza dan menjadikan DK PBB menjadikan lembaga yang gagal menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam pernyataannya, Perwakilan Amerika Serikat, Duta Besar Robert Wood, mengatakan dalam pernyataannya bahwa AS tidak dapat mendukung gencatan senjata tanpa syarat kecuali jika hal itu terkait dengan pembebasan sandera yang ditahan di Gaza oleh Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya (news.un.org, 2024).

Tidak hanya veto, Amerika Serikat juga menghentikan bantuannya ke *The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) selama 2023 – 2024. Tindakan ini mengakibatkan terhentinya bantuan kemanusiaan ke pengungsi-pengungsi Palestina di Gaza (reuters.com, 2025; news.un.org, 2024) dan pengungsi-pengungsi di negara lain di kawasan Timur Tengah seperti Yaman, Lebanon, Suriah dan Libya. Penghentian bantuan UNRWA menyebabkan krisis kemanusiaan berlanjut di Gaza.

Meskipun *great power diplomacy* menjadi tantangan besar dalam upaya perdamaian dalam Konflik Israel – Palestina sejak 2023 – 2024, pada akhirnya kesepakatan gencatan senjata antara Israel – Hamas tercapai pada 17 Januari 2025 setelah diumumkan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Kesepakatan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: pertama, gencatan senjata dan mengembalikan sandera tanpa syarat; kedua, peningkatan bantuan kemanusiaan untuk Gaza; dan ketiga, penarikan pasukan Israel dari daerah padat penduduk di Gaza (Hassenstab, 2025).

KESIMPULAN

Diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam Konflik Israel – Palestina, baik bilateral maupun multilateral, dilakukan sangat intens yang bisa dilihat dari kegiatan baik Presiden maupun Menteri Luar Negeri RI dalam setiap kunjungan bilateral maupun di forum-forum internasional terutama PBB. Ketika perjanjian gencatan senjata dicapai 17 Januari 2025, menunjukkan diplomasi multilateral yang dibangun oleh banyak negara termasuk Indonesia telah membuktikan bahwa lebih banyak negara yang mencita-citakan perdamaian dari pada peperangan. Selain itu, tantangan *great power diplomacy* yang datang dari Amerika Serikat dan Israel harus mengakui perdamaian lebih layak untuk diperjuangkan dibandingkan peperangan yang mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan.

REFERENSI

- Ayu, R. D., & Sekarwati, S. (2024). Resolusi PBB Mengharuskan Israel Angkat Kaki dari Tanah Palestina. *Tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/resolusi-pbb-mengharuskan-israel-angkat-kaki-dari-tanah-palestina-7665>
- Bargués, P. & Bourekba, M. (2024). Obstacles to Peace between Israel and Palestine. CIDOB. Barcelona Center for International Affairs. <https://www.cidob.org/en/publications/obstacles-peace-between-israel-and-palestine>
- Barston, R. P. (2013). *Modern Diplomacy*. New York: Routledge.

- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan.
- Bilmes, L.J et al. (2024). *United States Spending on Israel's Military Operations and Related U.S. Operations in the Region*, October 7, 2023 – September 30, 2024. https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2023/2024/Costs%20of%20War_US%20Support%20Since%20Oct%207%20FINAL%20v2.pdf
- Bull, H. (1977). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. New York: Palgrave.
- Devetak, R. et al. (2012). *An Introduction to International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Hamilton, K. & Langhorne, R. (2010). *The Practice of Diplomacy: Its evolution, theory and administration*. New York: Routledge.
- Hassenstab, N. (2025). *Understanding the Israel-Hamas Ceasefire Agreement*. <https://www.american.edu/sis/news/20250129-understanding-the-israel-hamas-ceasefire-agreement.cfm>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024a). Indonesia Konsisten Dukung Palestina Pada Pertemuan ACD Ke 19. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5997/berita/indonesia-konsisten-dukung-palestina-pada-ptm-acd-ke-19>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024b). KTT GNB Ke 19 Indonesia Dorong Keanggotaan Penuh Palestina Di PBB. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5696/berita/ktt-gnb-ke-19-indonesia-dorong-keanggotaan-penuh-palestina-di-pbb>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024e). Menlu RI Bertemu Presiden SMU PBB Bahas Isu Palestina Perubahan Iklim. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5929/berita/menlu-ri-bertemu-presiden-smu-pbb-bahas-isu-palestina-perubahan-iklim>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024g). Menlu RI Perjuangkan Hak Rakyat Palestina Pada Sidang Dewan Ham PBB Ke 55 Di Jenewa. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5782/berita/menlu-ri-perjuangkan-hak-rakyat-palestina-pada-sidang-dewan-ham-pbb-ke-55-di-jenewa>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023a). Indonesia Bantu Mobilisasi Negara Kawasan Untuk Dukung Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Melalui Majelis Umum PBB. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5605/berita/indonesia-bantu-mobilisasi-negara-kawasan-untuk-dukung-resolusi-gencatan-senjata-di-gaza-melalui-majelis-umum-pbb>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023b). Indonesia Desak Dewan Keamanan PBB Segera Hentikan Perang Di Gaza. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5422/berita/indonesia-desak-dewan-keamanan-pbb-segera-hentikan-perang-di-gaza>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023c). Indonesia Dorong Penghentian Perang Di Palestina Dalam Forum Perdagangan Dan Pembangunan Pbbunctad. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5540/berita/indonesia-dorong-penghentian-perang-di-palestina-dalam-forum-perdagangan-dan-pembangunan-pbbunctad>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023d). Indonesia Tegaskan Dukungan Terhadap Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5594/berita/indonesia-tegaskan-dukungan-terhadap-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023e). Indonesia Tegaskan Dukungan Terhadap Palestina Pada Peringatan 75 Tahun Deklarasi Ham. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from

- <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5595/berita/indonesia-tegaskan-dukungan-terhadap-palestina-pada-peringatan-75-tahun-deklarasi-ham>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023f). Bertemu Raja Yordania Presiden Jokowi Posisi Indonesia Dan Yordania Sama Soal Palestina. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5483/berita/bertemu-raja-yordania-presiden-jokowi-posisi-indonesia-dan-yordania-sama-soal-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023g). Dubes RI Jadi Juru Bicara Duta Besar Negara OKI Pada Pertemuan Di Senat Rumania Bahas Kondisi Palestina. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5451/berita/dubes-ri-jadi-juru-bicara-duta-besar-negara-ok-i-pada-pertemuan-di-senat-rumania-bahas-kondisi-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023h). Indonesia Kecam Keras Tindakan Kekerasan Di Gaza. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5406/berita/indonesia-kecam-keras-tindakan-kekerasan-di-gaza>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023i). Indonesia Tegaskan Dukungan Terhadap Palestina Pada Peringatan 75 Tahun Deklarasi Ham. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5595/berita/indonesia-tegaskan-dukungan-terhadap-palestina-pada-peringatan-75-tahun-deklarasi-ham>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023j). Indonesia Turki Akan Terus Kerja Sama Bantu Palestina. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5482/berita/indonesia-turki-akan-terus-kerja-sama-bantu-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023k). Presiden Jokowi Dan PM Kishida Bahas Kerja Sama Bilateral Sejumlah Bidang Hingga Isu Palestina. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5620/berita/presiden-jokowi-dan-pm-kishida-bahas-kerja-sama-bilateral-sejumlah-bidang-hingga-isu-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023l). Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan Untuk Palestina. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5457/berita/presiden-jokowi-lepas-bantuan-kemanusiaan-untuk-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023m). Presiden Jokowi Mendorong Oki Bersatu di Garda Terdepan Hadapi Krisis Gaza. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5485/berita/presiden-jokowi-mendorong-oki-bersatu-di-garda-terdepan-hadapi-krisis-gaza>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023n). Tiba Di Gedung Putih Presiden Jokowi Melakukan Pertemuan Dengan Presiden Biden. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5495/berita/tiba-di-gedung-putih-presiden-jokowi-melakukan-pertemuan-dengan-presiden-biden>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023o). Pemerintah Indonesia Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan Tahap Kedua Untuk Palestina. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5527/berita/pemerintah-indonesia-fasilitasi-bantuan-kemanusiaan-tahap-kedua-untuk-palestina>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024c). Menlu Jabarkan Diplomasi Indonesia Untuk Palestina All Eyes on Rafah Di Ugm Yogyakarta. Kemlu. Retrieved July 2, 2024, from <https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/5951/berita/menlu-jabarkan-diplomasi-indonesia-untuk-palestina-all-eyes-on-rafah-di-ugm-yogyakarta>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024f). Menlu RI Desak Negara Negara Eropa Untuk Dorong Implementasi Two State Solution. Kemlu. Retrieved July 2,

- [di-palestina-dalam-forum-perdagangan-dan-pembangunan-pbbunctad](#)
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2021b. Isu Palestina. kemlu.go.id. https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina
- Masters, J. & Merrow, W. (2025). *U.S. Aid to Israel in Four Charts*. <https://www.cfr.org/article/us-aid-israel-four-charts>
- McGlinchey, S. (2017). *International Relations*. Bristol: E-International Relations Publishing.
- Miles, et al. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Method Sourcebook*. 3rd edition. USA: Sage Publications.
- Mudore, S.B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia dalam Konflik Israel – Palestina. *Center of Middle Eastern Studies*. 12(2).
- Neuman, W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Seventh Edition. USA: Pearson.
- Nicolson, H. (1942). *Diplomacy*. London: Oxford University Press.
- Nugraha, F. (2024). Majelis Umum PBB Desak Gencatan Senjata Gaza dan Pembebasan Sandera. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCxDdY-majelis-umum-pbb-desak-gencatan-senjata-gaza-dan-pembebasan-sandera#:~:text=New%20York%3A%20Majelis%20Umum%20Perserikatan,seluruh%20sandera%20yang%20masih%20ditan>
- Nugraha, T. A., & Maura, A. (2023). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia: Promosi ‘Keamanan Manusia’ di Palestina. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*. 8(2), 81–106.
- OHCHR. (2024). *Experts hail ICJ declaration on illegality of Israel’s presence in the occupied Palestinian territory as “historic” for Palestinians and international law*. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-presence-occupied#:~:text=The%20landmark%20>

INTERDEPENDENCE JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES

Volume 7 No. 2 Tahun 2026

- [20ruling%20of%2019.and%20use%20of%20natural%20resources](#)
- Özer, U. (2018). Definition and Importance of Diplomacy. In Erhan Akdemir (ed.), *Diplomacy*. Istanbul: Anadolu University.
- Pouliot, V. & Cornut, J. (2015). Practice Theory and the Study of Diplomacy: A Research Agenda. *Cooperation and Conflict*. 50(3).
<https://doi.org/10.1177/001083671557491>
- 3.
- Wight, M. (2002). *Power Politics*. London: Continuum.
- YDSF. (2023). Perjuangan Palestina, Dari Nakba 1948 hingga Genosida 2023.
<https://ydsf.org/berita/perjuangan-palestina-dari-nakba-1948-hingga-genosida-2023-ydsf-fNX1071.html>.